

## KONSEP DAN MEKANISME KEBIJAKAN MONETER KONVENSIONAL DAN KEBIJAKAN MONETER ISLAM

Fahrul Hudatil Atkiyan<sup>1</sup>, Andi Putradi<sup>2</sup>

<sup>1</sup>Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, UIN Sunan Kalijaga

<sup>1</sup>email: [fahrolatkiyan@gmail.com](mailto:fahrolatkiyan@gmail.com)

<sup>2</sup>Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, UIN Sunan Kalijaga

<sup>2</sup>email: [andiputradi111198@gmail.com](mailto:andiputradi111198@gmail.com)

### ABSTRAK

*Kebijakan moneter merupakan suatu strategi yang dilakukan oleh pemerintah disuatu negara dan otoritas moneter seperti Bank Central sebagai usaha untuk menstabilkan terjadi kenaikan harga secara umum (Inflasi). Beberapa kebijakan dilakukan oleh pemerintah seperti mengurangi jumlah uang yang beredar, menjaga kestabilan nilai mata uang dan lain sebagainya. namun, kebijakan moneter konvensional dinilai tidak terlalu efektif dalam menanggulangi masalah perekonomian yang terjadi pada suatu negara. Penelitian ini kemudian meneliti bagaimana perbedaan antara konsep kebijakan moneter konvensional dan kebijakan moneter Islam dengan menggunakan metode penelitian studi literatur, yang dimana penelitian ini mengumpulkan beberapa karya tulis ilmiah yang membahas terkait dengan obyek yang diteliti. Dalam peneltian ini menemukan bahwa kebijakan moneter Islam memberikan dampak yang baik bagi perekonomian negara jika dibandingkan dengan kebijakan moneter konvensional.*

**Kata Kunci:** Kebijakan Moneter Konvensional, Kebijakan Moneter Islam

### ABSTRACT

*Monetary policy is a strategy carried out by the government in a country and monetary authorities such as the Central Bank as an effort to stabilize the general increase in prices (inflation). Several policies have been implemented by the government, such as reducing the amount of money in circulation, maintaining the stability of the currency value and so on. However, conventional monetary policy is considered not very effective in overcoming economic problems that occur in a country. This research then examines the differences between the concepts of conventional monetary policy and Islamic monetary policy using a literature study research method, where this research collects several scientific papers that discuss the object under study. This research found that Islamic monetary policy had a good impact on the country's economy when compared to conventional monetary policy.*

**Keyword:** Conventional Monetary Policy, Islamic Monetary Policy

## I. PENDAHULUAN

Penomena terjadinya peningkatan pada harga barang dan jasa secara umum dan kontinu merupakan gambaran dari inflasi (Dwihapsari et al., 2021). Fenomena tersebut merupakan masalah yang dapat mengganggu kestabilan ekonomi bahkan dapat mengganggu kegiatan perekonomian suatu negara. selain itu, jika inflasi dibiarkan berlangsung lama dapat menimbulkan krisis resesi ataupun depresi ekonomi. Maka tidak salah jika pengendalian inflasi menjadi salah satu perhatian pemerintah di berbagai

negara (Sutawijaya, 2012). Oleh sebab itu, pemerintah kerap mengeluarkan kebijakan-kebijakan yang dianggap mampu mengatasi masalah tersebut, seperti mengeluarkan kebijakan moneter.

Kebijakan moneter adalah sebuah kebijakan makroekonomi yang dikelola Bank Sntral untuk mempengaruhi kegiatan ekonomi melalui pengawasan terhadap jumlah uang yang beredar atau tingkat suku bunga sehingga kestabilan nilai rupiah akan terjaga dan terpelihara ( Bank Indonesia, 2017). Menurut Litte Boy dan Taylor (2006) dan Mishkin (2004) kebijakan moneter adalah semua upaya atau tindakan Bank sentral dalam mencapai atau mempengaruhi perkembangan variabel moneter (uang beredar, suku bunga, kredit dan nilai tukar) untuk mencapai tujuan ekonomi tertentu. Definisi lain juga menjelaskan kebijakan moneter adalah suatu usaha dalam mengendalikan keadaan ekonomi makro agar dapat berjalan sesuai dengan yang diinginkan melalui pengatulan jumlah uang yang beredar dalam perekonomian (Latifah, 2017). Kebijakan moneter memiliki fungsi utama dalam rangka mencapai stabilitas ekonomi secara makro yang tercermin dalam kesempatan kerja yang tersedia cukup luas, stabilitas harga hingga perkembangan output rill yang semakin membaik (Ega Rusanti et al., 2020). Penggunaan kebijakan moeter ini merupakan saluran yang akan mengendalikan dan mengatur perekonomian untuk mencapai stabilitas. Transmisi kebijakan moneter bekerja dengan berbagai saluran diantaranya agregat moneter, nilai tukar, suku bunga, kredit, ekpektasi, dan harga aset (Warjiyo, 2017). Natsir (2007), menjelaskan ada beberapa indikator untuk mengukur mekanisme kebijakan moneter (MTKM) dapat di ukur melalui dua indikator, diantaranya dengan mengukur berapa besar kecepatan (*time lag*) atau dengan mengukur beberapa besar kekuatan variabel-variabel dalam merespon adanya *shock* hingga terwujudnya tingkat inflasi stabil (Natsir, 2018).

Namun, dalam beberapa literatur menemukan bahwa kebijakan moneter menjadi salah satu penyebab masalah inflasi itu sendiri. Sebagai mana hasil penelitian Ascarya (2013) yang menyatakan bahwa salah satu akar penyebab krisis keuangan adalah ketidakstabilan dan ketidakadilan sistem moneter atau keuangan (Ascarya, 2012). Begitupun penelitian lain juga menjelaskan bahwa kebijakan moneter bersifat kontradiktif sehingga menyebabkan kondisi perekonomian sebuah negara memburuk (Natsir, 2018). Oleh karena itu, kebijakan moneter yang bersifat konvensional ini masih memunculkan sebuah problematik dalam pembahasan maupun penerapannya. Kebijakan moneter yang masih memiliki berbagai macam problematik dalam penerapannya meimbulkan berbagai macam tawaran kebijakan lainnya, seperti kebijakan moneter syariah.

Islam memandang kebijakan moneter memiliki tujuan yaitu untuk menjaga stabilitas dari mata uang sehingga pemerataan pertumbuhan ekonomi tercapai. Instrumen kebijakan moneter syariah menggunakan *profit loss sharing*, margin, dan fee untuk menggantikan sistem suku bunga karena pelaku ekonomi syariah meyakini bahwa bunga sebagai komponen riba dalam transmisi kebijakan moneter (Dwihapsari et al., 2021). Dalam sistem ekonomi syariah yang dikenal bukanlah sistem suku bunga melainkan sistem pembagian keuntungan dan kerugian (*profit and loss sharing*). Besar kecilnya pembagian keuntungan tergantung pada kegiatan investasi dan pembiayaan yang dilakukan di sektor rill (Zaelina, 2017). Stabilitas dalam nilai uang merupakan sebuah hasil yang didapat dari sebuah ketulusan dan keterbukaan dalam muamalah (Herianingrum & Syapriatama, 2016). Instrumen-nstrumen dalam pengendalian moneter menurut perekonomian Islam, terdiri dari: cadangan wajib resmi / GMW, saham publik terhadap depositu unjuk (uang giral), target pertumbuhan dalam M dan Mo, alokasi kredit yang berorientasi kepada nilai, sertifikat Bank Syariah Indonesia (SBIS), dan psar uang antara Bank Syariah (PUAS) derta pembatasan kredit (Ega Rusanti et al., 2020).

Dalam penelitian yang pernah dilakukan Ascarya (2012) disimpulkan bahwa kebijakan moneter untuk pengurangan inflasi dengan pola syariah lebih efektif daripada pola konvensional. Variabel-varabel

konvensional yang utamanya adalah variabel sektor finansial, secara alamiah memicu inflasi dan menghambat pertumbuhan ekonomi. Sedangkan variabel-variabel syariah yang utamanya adalah variabel sektor riil, secara alamiah tidak memicu inflasi dan mendorong pertumbuhan ekonomi. Penelitian yang sejalan juga dijelaskan oleh Yoghi (2013) dalam penelitiannya mengatakan bahwa instrumen kebijakan moneter syariah merupakan instrumen yang tepat dalam mengendalikan tingkat inflasi.

Beberapa pembahasan di atas menjelaskan bagaimana kerja sistem kebijakan moneter konvensional dan sistem kebijakan moneter syariah. Oleh karena itu, maka dalam tulisan ini penulis mencoba menjelaskan bagaimana perbedaan konsep-konsep antara kebijakan moneter konvensional dan konsep kebijakan moneter *syari'ah*.

## II. METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah studi literatur (Library Research). Menurut (Huges, 2008) Studi literatur merupakan studi penelitian yang dilakukan melalui mengumpulkan data atau karya tulis ilmiah yang bertujuan dengan obyek penelitian atau pengumpulan data yang bersifat kepustakaan, atau telaah yang dilaksanakan untuk memecahkan suatu masalah yang pada dasarnya tertumpu pada penelaah kritis dan mendalam terhadap bahan-bahan pustaka yang relevan (Anisa Mawaddah Nasution & Batubara, 2023).

Dalam penelitian ini penelitian dilakukan untuk mengetahui bagaimana perbedaan antara kebijakan moneter konvensional dan moneter islam. Pada bagian ini dilakukan pengkajian mengenai konsep-konsep dari kebijakan moneter konvensional dan kebijakan moneter Islam melalui studi literatur studi pustaka yang tersedia, terutama dari artikel-artikel ilmiah yang dipublikasikan dalam berbagai jurnal ilmiah.

## III. HASIL DAN PEMBAHASAN

Kebijakan moneter merupakan kebijakan otoritas moneter atau bank sentral dalam bentuk pengendalian besaran moneter untuk mencapai perkembangan kegiatan perekonomian yang diinginkan. Dalam praktek, perkembangan kegiatan perekonomian yang diinginkan tersebut adalah stabilitas ekonomi makro yang antara lain dicerminkan oleh stabilitas harga (rendahnya laju inflasi), membaiknya perkembangan *output riil* (pertumbuhan ekonomi), secara cukup luasnya lapangan /kesempatan kerja yang tersedia (Bank Indonesia, 2017). Dalam literatur ekonomi konvensional, menurut Djohanputro (2006), kebijakan moneter merupakan tindakan pemerintah dalam rangka mencapai tujuan pengelolaan ekonomi makro(output, harga dan pengangguran) dengan cara mempengaruhi situasi makro melalui pasar uang atau dengan kata lain melalui proses penciptaan uang atau jumlah uang beredar.

### Mekanisme Kebijakan Moneter

Mekanisme transmisi kebijakan moneter, menurut Taylor (1995) menyatakan bahwa mekanisme transmisi kebijakan moneter merupakan jalur-jalur yang dilalui oleh kebijakan untuk dapat mempengaruhi sasaran akhir kebijakan moneter yaitu pendapatan nasional dan inflasi. Pada dasarnya transmisi kebijakan moneter merupakan interaksi bank sentral sebagai otoritas moneter dengan perbankan dan lembaga keuangan lainnya, serta pelaku ekonomi sektor riil. Interaksi ini terjadi melalui dua tahapan proses perputaran uang. Pertama, interaksi antara bank sentral dengan perbankan dan lembaga keuangan lainnya dalam berbagai transaksi di pasar keuangan. Kedua, interaksi yang berkaitan

dengan fungsi intermediasi antara industri perbankan dan lembaga keuangan lainnya dengan para pelaku ekonomi dalam berbagai kegiatan ekonomi di sektor rill (Pohan, 2008).

Kebijakan moneter bertujuan untuk mengawasi dan mempengaruhi kestabilan, kegiatan dan pertumbuhan ekonomi. Kebijakan moneter yang ditetapkan oleh Bank Sentral berupa kebijakan kuantitatif dan kualitatif (Jumiati, 2022)..

#### 1. Kebijakan Kuantitatif

##### a. *Open market operation* (operasi pasar terbuka)

Bank sentral melakukan jual beli surat-surat berharga untuk mempengaruhi jumlah uang yang beredar (Zaelina, 2017).

##### b. Politik Diskonto

Politik diskonto adalah peraturan jumlah uang yang beredar dengan memainkan tingkat bunga bank sentral pada bank umum. Bank umum kadang-kadang memiliki masalah likuiditas sehingga harus meminjam ke bank sentral (Jumiati, 2022).

##### c. Giro Wajib Minimum

Giro wajib minimum adalah mengatur jumlah uang yang beredar dengan memainkan jumlah dana cadangan perbankan yang harus disimpan di bank sentral (Jumiati, 2022). Jadi, apabila terjadi kenaikan tingkat inflasi, bank sentral akan menaikkan ketentuan cadangan wajib minimum. Rustandi (2019) menyatakan bahwa dana yang disalurkan oleh bank umum kepada masyarakat berkurang dan tingkat inflasi turun.

#### 2. Kebijakan Kualitatif

Kebijakan kualitatif adalah kebijakan Bank sentral yang bertujuan mengawasi bentuk-bentuk pinjaman dan investasi yang dilakukan oleh bank-bank perdagangan (Jumiati, 2022).

##### a. *Selective Credit Control* (pengawasan terhadap kredit)

Pemberian kredit pada sektor produktif yang diawasi adalah corak pinjaman dan bentuk investasi yang dilakukan bank umum.

##### b. *Moral Suasion*

Bank sentral dapat melakukan himbuan menggunakan tulisan atau lisan berupa ajakan untuk melakukan atau tidak suatu tindakan tertentu. Misalnya, Bank Indonesia mengajak bank-bank rasional maupun Bank asing mengusahakan penurunan tingkat bunga (Putra, 2015).

### **Instrumen Pengendalian Moneter**

Kebijakan moneter dapat menggunakan instrumen baik langsung maupun tidak langsung. Instrumen langsung adalah instrumen pengendalian moneter yang dapat secara langsung dapat mempengaruhi sasaran operasional yang diinginkan oleh bank sentral. Adapun instrumen tidak langsung adalah instrumen pengendalian moneter yang secara tidak langsung dapat mempengaruhi sasaran operasional yang diinginkan oleh bank sentral (Ascarya, 2016). Di dalam pelaksanaan kebijakan moneter, Bank Sentral biasanya menggunakan berbagai piranti instrumen dalam mencapai sasaran. Di antara instrumen itu adalah cadangan wajib (*reserve requirement*), operasi pasar terbuka (*open market operation*), fasilitas diskonto (*discount policy*), dan imbauan (*moral suasion*) (Pohan, 2008).

### **Mekanisme Transmisi Kebijakan Moneter**

Mekanisme transmisi kebijakan moneter pada dasarnya menggambarkan bagaimana kebijakan moneter yang ditempuh bank sentral mempengaruhi berbagai aktivitas ekonomi dan keuangan sehingga

pada akhirnya dapat mencapai tujuan akhir yang ditetapkan. Taylor (1995), menyatakan bahwa mekanisme transmisi kebijakan moneter adalah” *the procces through wich monetary policy decisions are transmitted into changes in real GDP and inflation*”.

Mekanisme transmisi moneter dimulai dari tindakan bank sentral dengan menggunakan instrumen moneter, apakah OPT atau yang lain, dalam melaksanakan kebijakan moneter. Tindakan itu kemudian berpengaruh dalam aktivitas ekonomi dan keuangan melalui berbagai saluran transmisi kebijakan moneter, yaitu saluran uang, kredit, suku bunga, nilai tukar, harga set dan ekspektasi. Di bidang keuangan, kebijakan moneter berpengaruh terhadap perkembangan suku bunga, nilai tukar, dan harga saham disamping volume dana masyarakat yang disimpan di bank, kredit yang disalurkan di bank kepada dunia usaha, penanaman dana pada obligasi, saham maupun sekuritas lainnya. Sementara itu, di sektor ekonomi riil kebijakan moneter selanjutnya mempengaruhi perkembangan konsumsi, investasi, ekspor dan impor, hingga pertumbuhan ekonomi dan inflasi yang merupakan sasaran akhir kebijakan moneter (Warjiyo, 2017).

### **Instrumen Kebijakan Moneter Islam**

Adiwarman Karim membagi instrumen-instrumen kebijakan moneter islam dalam tiga mazhab, yaitu: (Kari, 2020)

- a. Mazhab Iqtishaduna
  - 1). Pada masa awal islam, tidak diperlukan kebijakan moneter karena hampir tidak adanya sistem perbankan dan minimnya penggunaan uang.
  - 2). Uang dipertukarkan dengan sesuatu yang benar-benar memberikan nilai tambah bagi perekonomian
  - 3). Perputaran uang dalam periode tertentu sama dengan nilai barang dan jasa yang
- b. Mazhab kedua  
bertujuan untuk memaksimalkan sumber daya yang ada agar dapat dialokasikan pada kegiatan perekonomian yang produktif. Melalui instrumen” *does of ible fund*” yang dapat mempengaruhi besar kecilnya permintaan uang agar dapat dialokasikan ada peningkatan produktifitas perekonomian secara keseluruhan
- c. Mazhab Alternatif  
Kebijakan moneter melalui “*syuratiq procces*”, dimana suatu kebijakan yang diambil oleh otoritas moneter adalah berdasarkan musyawarah sebelumnya dengan otoritas sektor riil. Sehingga terjadi harmonisasi antara kebijakan moneter dan sektor riil.

Secara mendasar, terdapat beberapa instrumen kebijakan moneter dalam ekonomi islam, antara lain (Muhammad, 2002).

- a. *Reseve Ratio*  
Adalah suatu persentase tertentu dari simpanan bank yang harus dipegang oleh bank sentral, misalnya 5%. Jika bank sentral ingin mengontrol uang beredar, dapat menaikkan RR misalnya dari 5% menjadi 20%, yang dampaknya sisa uang yang ada pada komersial bank menjadi lebih sedikit, begitu sebaliknya.
- b. *Moral Suasion*  
Bank sentral dapat membujuk bank-bank untuk meningkatkan permintaan kredit sebagai tanggung jawab mereka ketika ekonomi berada dalam keadaan depresi. Dampaknya, kredit dikucurkan maka uang dapat dipompa ke dalam ekonomi.
- c. *Loading Ratio*

Dalam ekonomi islam tidak ada istilah landing (meminjamkan), landing ratio dalam hal ini berarti Qordul Hasan (pinjaman kebaikan).

d. *Refinance Ratio*

Adalah sejumlah proporsi dari pinjaman bebas bunga. Ketika refinance ratio meningkat, pembiayaan yang diberikan meningkat, dan ketika refinance ratio turun, bank komersial harus hati-hati karena mereka tidak didorong untuk memberikan pinjaman.

e. *Profit Sharing Ratio*

Ratio bagi keuntungan harus ditentukan sebelum memulai instrumen moneter, di mana ketika bank sentral ingin meningkatkan jumlah uang beredar, maka ratio keuntungan nasabah akan ditingkatkan.

f. *Islamic Sukuk*

Adalah obligasi pemerintah, di mana ketika terjadi inflasi pemerintah akan melakukan sukuk lebih banyak sehingga uang akan mengalir ke bank sentral dan jumlah uang beredar akan tereduksi. Jadi sukuk memiliki kapasitas untuk menaikkan atau menurunkan jumlah uang beredar.

g. *Government investmen certificate*

Penjualan atau pembelian sertifikat bank sentral dalam kerangka komersial, disebut sebagai treasury bills. Instrumen ini dikeluarkan oleh menteri keuangan dan dijual oleh bank sentral kepada broker dalam jumlah bbesar, dalam jangka pendek dan berbunga meskipun kecil. Reasury bills ini tidaat diterima dalam islam maka sebagai penggantinya diterbitkan pemerintah dengan sistem bebas bunga, yang disebut GIC.

h. *Reksadana Syariah*

Mengandung pengertian sebagai reksadan yang pengelolaan dan kebijakan investasinya mengacu pada syariat islam. Reksadan syariah misalnya tidak menginvestasikan atau produknya bertentangan dengan syariah Islam seperti membangun pabrik minuman keras yang mengandung alkohol, beternak babi, sebagainya.

Berdasarkan penjelasan di atas, maka dapat diartikan bahwa instrumen-instrumen kebijakan moneter yang ada dalam kebijakan moneter konvensional dianggap tidak sesuai dengan *syariah* karena instrumen kebijakan moneter konvensional mengandung bunga atau mengandung hal-hal yang dilarang dalam Islam. Dalam beberapa literatur yang menjelaskan mengenai dampak dari kebijakan moneter konven, menemukan bahwa penerapan kebijakan moneter konvensional memberikan dampak negatif terhadap kerugian negara. dalam peneliatin (Ascarya, 2012) menyatakan bahwa salah satu akar penyebab krisis keuangan adalah ketidakstabilan dan ketidakadilan sistem moneter atau keuangan. Penelitian lain juga dilakukan oleh (Natsir, 2018) menjelaskan bahwa kebijakan moneter bersifat kontradiktif sehingga menyebabkan kondisi perekonomian sebuah negara memburuk. Oleh karena itu, dapat dikatakan bahwa kebijakan moneter memiliki dampak yang kurang baik dalam perekonomian suatu negara.

#### IV. KESIMPULAN

Kebijakan moneter adalah kebijakam pemerintah untuk mengatur jumlah uang yang beredar untuk mencegah terjadinya inflasi yang bisa menyebabkan krisis ekonomi. Dalam kebijakan moneter konvensional terdapat beberapa instrumen kebijakan yang mengandung hal-hal yang tidak sesuai dengan nilai syariah sehingga hal tersebut diasumsikan menimbulkan masalah-masalh yang bisa mengganggu perekonomian. Sedangkan dari beberapa literatur, menejelaskan bahwa instrumen kebijakan moneter

yang terkandung dalam ajaran Islam dinilai lebih unggul dalam mengatasi masalah-masalah keuangan atau perekonomian.

## V. REFERENSI

- Anisa Mawaddah Nasution, & Batubara, M. (2023). Penerapan Kebijakan Moneter Islam pada Sistem Perekonomian Indonesia. *Jurnal Penelitian Ekonomi Akuntansi (JENSI)*, 7(1), 144–154. <https://doi.org/10.33059/jensi.v7i1.7665>
- Ascarya. (2012). *Alur Transmisi Dan Efektivitas Kebijakan Moneter Ganda DI Indonesia*. 283–315.
- Ascarya. (2016). *Instrumen-Instrumen Pengendalian Moneter* (Issue January 2002).
- Dwihapsari, R., Kurniaputri, M. R., & Huda, N. (2021). Analisis Efektivitas Kebijakan Moneter Dalam Perspektif Konvensional dan Syariah Terhadap Inflasi di Indonesia Tahun 2013-2020. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, 7(2), 980–993. <https://doi.org/10.29040/jiei.v7i2.2368>
- Ega Rusanti, A.Syathir Sofyan, Syarifuddin, & Nurfiah Anwar. (2020). Instrumen Studi Komparatif Kebijakan Moneter Konvensional Dan Islam Dalam Pengendalian Inflasi. *Jurnal Asy-Syarikah: Jurnal Lembaga Keuangan, Ekonomi Dan Bisnis Islam*, 2(2), 1–10. <https://doi.org/10.47435/asy-syarikah.v2i2.414>
- Herianingrum, S., & Syapriatama, I. (2016). Dual Monetary System and Macroeconomic Performance in Indonesia. *Al-Iqtishad: Jurnal Ilmu Ekonomi Syariah*, 8(1), 65–80. <https://doi.org/10.15408/aiq.v8i1.2509>
- Indonesia, B. (2017). *Kebijakan Moneter*. Bank Indonesia.
- Jumiati, E. (2022). Kebijakan Moneter Sebagai Pengendali Inflasi Dan Nilai Tukar (Peran Bank Sentral). *Jurnal Perbankan Syariah*, 2(1), 1–14.
- Kari, A. (2020). *Ekonomi Makro Islam* (1st ed.). Rajawali pers.
- Latifah, A. N. (2017). Kebijakan Pengendalian Moneter di Indonesia dalam Perspektif Perbankan Syari'ah. *Syariati: Jurnal Studi Al-Qur'an Dan Hukum*, 3(01), 103–118. <https://doi.org/10.32699/syariati.v3i01.1146>
- Muhammad. (2002). *Kebijakan Fiskal dan Moneter Dalam Ekonomi Islam*. Salemba Empat.
- Natsir, M. N. (2018). Analisis Empiris Efektivitas Mekanisme Transmisi Kebijakan Moneter Di Indonesia Melalui Jalur Ekspektasi Inflasi Periode 1990:2-2007:1. *EKUITAS (Jurnal Ekonomi Dan Keuangan)*, 13(3), 288–307. <https://doi.org/10.24034/j25485024.y2009.v13.i3.385>
- Pohan, A. (2008). *Kerangka Kebijakan Moneter Dan Implementasinya Di Indonesia* (1st ed.). Raja Grafindo Persada.
- Putra, M. U. M. (2015). Peran dan Kebijakan Moneter Terhadap Perekonomian Sumatera Utara. *Jurnal Wira Ekonomi Mikroskil*, 5(1), 41–50. <https://doi.org/10.55601/jwem.v5i1.224>
- Sutawijaya, A. (2012). Pengaruh Faktor-Faktor Ekonomi Terhadap Inflasi Di Indonesia. *Jurnal Organisasi Dan Manajemen*, 8(2), 85–101. <https://doi.org/10.33830/jom.v8i2.237.2012>
- Warjiyo, P. (2017). *Mekanisme Transmisi Kebijakan Moneter Di Indonesia*. Pusat Pendidikan Dan Studi (PPSK) Bank Indonesia.
- Zaelina, F. (2017). *Mekanisme Transmisi Kebijakan Moneter Syariah* [Universitas Islam Indonesia]. [https://dspace.uui.ac.id/bitstream/handle/123456789/33209/13918018 Fitri Zaelina.pdf](https://dspace.uui.ac.id/bitstream/handle/123456789/33209/13918018%20Fitri%20Zaelina.pdf)